



COMMUNITY ENGAGEMENT ARTICLE

Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kampung Aimo, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong

La Ibal^{1*} | Rahful A. Madaul² | Hilmi Hilmansyah³ | Umami Hanifa M⁴ | Endang Abubakar⁵ | Murni⁶ | Rahmi Ariani Salam⁷ | Mega Wulandari⁸ | Slamet Widodo⁹ | Stevanus Viki Klau¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia.

Correspondence

^{1*} Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia.
Email: ibal.laode1991@gmail.com.

Funding information

Universitas Muhammadiyah Soron.

Abstract

The Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes) serves as a fundamental framework for steering village development across a six-year span. Nevertheless, numerous villages encounter significant obstacles in drafting this plan, primarily due to constrained human resources and a lack of technical proficiency. This community engagement initiative seeks to support the local administration of Aimo Village in formulating an RPJMDes that prioritizes community involvement, relies on accurate data, and adheres to regulatory standards. The approach adopted encompasses capacity-building sessions, collaborative dialogues, and hands-on technical guidance. Findings reveal that a preliminary version of the RPJMDes was effectively crafted, incorporating the village leader's vision and mission, strategic policy outlines, and a structured set of priority development initiatives. Furthermore, the process bolstered the skills of village officials and fostered greater public engagement in shaping development plans.

Keywords

RPJMDes; Participatory Planning; Technical Assistance; Aimo Village.

Abstrak

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) menjadi pedoman esensial dalam mengarahkan pembangunan desa selama kurun waktu enam tahun. Akan tetapi, banyak desa masih menghadapi hambatan berarti dalam proses penyusunannya, terutama akibat keterbatasan sumber daya manusia dan penguasaan aspek teknis. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk mendukung pemerintahan Kampung Aimo dalam merumuskan RPJMDes yang melibatkan partisipasi warga, didasarkan pada data yang valid, dan selaras dengan peraturan yang berlaku. Pendekatan yang diterapkan meliputi sesi pelatihan, diskusi yang mengutamakan kolaborasi, dan bimbingan teknis secara langsung. Hasilnya, draf awal RPJMDes berhasil disusun, yang memuat visi serta misi kepala kampung, garis besar kebijakan strategis, dan rangkaian program pembangunan prioritas yang tertata rapi. Lebih jauh, kegiatan tersebut turut memperkuat kemampuan aparat kampung dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam merancang arah pembangunan.

Kata Kunci

RPJMDes; Perencanaan Partisipatif; Pendampingan Teknis; Kampung Aimo.

1 | PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal (Permana, 2018; Nining *et al.*, 2023). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang luas bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam merancang dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal (Femilia & Huda, 2020; Sugiman, 2018). Desa diharapkan mampu menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang berlaku untuk enam tahun masa jabatan kepala desa. RPJMDes berfungsi sebagai acuan utama dalam menyusun rencana tahunan (RKPDes), penganggaran (APBDes), serta evaluasi capaian pembangunan desa (Baihaqi *et al.*, 2019). Dokumen ini juga mencerminkan visi, misi, dan arah kebijakan kepala desa terpilih yang dijabarkan melalui program-program prioritas desa. Oleh karena itu, penyusunan RPJMDes harus dilakukan secara partisipatif, akuntabel, serta berdasarkan data dan potensi yang valid (Hasanati *et al.*, 2025; Syamsudin, 2022). Dalam praktiknya, banyak desa di Indonesia masih menghadapi kendala dalam menyusun RPJMDes, baik karena keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman teknis, maupun sarana pendukung.

Kampung Aimo, yang terletak di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, merupakan salah satu desa yang menghadapi tantangan serupa. Keterbatasan aparatur kampung dalam memahami proses dan teknis penyusunan RPJMDes menyebabkan desa ini belum memiliki dokumen perencanaan jangka menengah yang memadai (Londa *et al.*, 2021; Fry, 2022). Hal ini berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan yang efektif, terarah, dan berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan juga masih rendah karena kurangnya fasilitasi dan pemahaman terhadap pentingnya partisipasi publik. Kondisi tersebut mendorong pentingnya intervensi dalam bentuk pendampingan dan penguatan kapasitas, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk membantu Kampung Aimo menyusun RPJMDes yang berbasis data, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan. Pendampingan dilakukan melalui pendekatan edukatif dan praktis, dengan melibatkan perangkat kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), serta unsur masyarakat lainnya.

Pengabdian ini juga bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Melalui proses perencanaan yang terbuka dan inklusif, harapannya masyarakat Kampung Aimo dapat lebih aktif berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan desanya. Dengan adanya RPJMDes yang terstruktur, desa akan memiliki panduan yang jelas dalam mengalokasikan anggaran, melaksanakan kegiatan, serta mengevaluasi hasil pembangunan setiap tahunnya. Selain aspek teknis penyusunan, pengabdian ini juga berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia desa. Pelatihan, diskusi kelompok, dan asistensi teknis diberikan untuk memastikan bahwa aparat desa memahami setiap tahapan penyusunan RPJMDes. Kegiatan ini juga mengajarkan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pendamping desa, tokoh masyarakat, dan lembaga masyarakat desa dalam menyusun dokumen perencanaan yang realistis dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pendampingan ini dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti keterbatasan waktu, sarana pendukung, serta minimnya pengalaman teknis dari aparat kampung. Namun, melalui pendekatan yang adaptif dan komunikatif, proses pendampingan dapat berjalan dengan baik. Musyawarah desa, survei lapangan, dan penyusunan dokumen dilakukan secara bersama-sama dan bertahap agar hasilnya dapat diterima oleh seluruh elemen kampung. Secara keseluruhan, kegiatan ini diharapkan menjadi contoh praktik baik dalam mendampingi desa-desa lain yang menghadapi permasalahan serupa. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, desa dapat memiliki dokumen RPJMDes yang berkualitas sebagai fondasi bagi pembangunan desa yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

2 | LANDASAN TEORI

RPJMDesa disusun guna memastikan adanya keterpaduan dan kesinambungan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan di tingkat desa (Sumarauw *et al.*, 2019). Dokumen ini merupakan bentuk konkret dari visi dan misi Kepala Desa terpilih yang dijabarkan secara operasional. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMDes secara optimal demi mencapai target yang telah ditetapkan (Hendri, 2022). RPJMDes juga berfungsi sebagai panduan berpikir yang sistematis terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat desa, potensi sumber daya yang dimiliki, serta langkah-langkah strategis yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan bersama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membangun pemerintahan desa yang demokratis, berkeadilan, dan transparan (Sahri *et al.*, 2022). Pembangunan desa perlu dirancang secara terencana, memiliki batas waktu yang jelas, serta disesuaikan dengan karakteristik sosial dan geografis masyarakat setempat agar pelaksanaannya efektif dan menghasilkan dampak yang

positif (Hendra & Fahlevi, 2024). Pembangunan ini mencakup aspek fisik maupun non-fisik. Dalam pelaksanaannya, partisipasi aktif dari masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, serta institusi di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota sangat diperlukan. Seluruh tahapan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, pemantauan hingga evaluasi perkembangan harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif agar pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga.

3 | METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini bersifat partisipatif dan aplikatif, dengan pendekatan *community-based development*. Kegiatan dimulai dengan tahap identifikasi awal melalui kunjungan lapangan dan wawancara informal dengan aparat kampung, tokoh masyarakat, serta pendamping desa. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memahami kondisi awal Kampung Aimo, termasuk ketersediaan data, struktur pemerintahan kampung, serta tantangan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan. Hasil dari tahap ini digunakan sebagai dasar untuk merancang materi pelatihan dan strategi pendampingan yang sesuai dengan konteks lokal. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pelatihan teknis dan *workshop* penyusunan RPJMDes. Dalam kegiatan ini, peserta yang terdiri dari aparat kampung, BPK, dan perwakilan masyarakat dilatih mengenai dasar hukum penyusunan RPJMDes, tahapan penyusunan, teknik penggalan data partisipatif, serta penyusunan visi, misi, dan program prioritas pembangunan desa. Kegiatan ini disampaikan melalui metode presentasi, diskusi kelompok, dan simulasi langsung. Selain itu, fasilitator juga memberikan contoh dokumen RPJMDes dari desa lain sebagai bahan pembelajaran dan referensi. Tahap terakhir adalah pendampingan teknis langsung dalam proses penyusunan draf RPJMDes Kampung Aimo. Kegiatan ini melibatkan asistensi dalam pengumpulan dan pengolahan data desa, pemetaan potensi dan permasalahan, serta penyusunan logika perencanaan yang sistematis. Pendampingan dilakukan secara intensif hingga tersusunnya draf awal RPJMDes yang kemudian dibahas dalam forum musyawarah kampung. Pada tahap ini, fasilitator juga memberikan umpan balik dan rekomendasi untuk penyempurnaan dokumen sebelum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah kampung. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa proses penyusunan RPJMDes tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga reflektif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

4 | HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Kegiatan pendampingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Kampung Aimo telah menghasilkan sejumlah capaian penting, baik dari aspek penyusunan dokumen perencanaan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kampung. Salah satu hasil utama yang berhasil dicapai adalah penyusunan draf awal dokumen RPJMDes yang mencakup visi dan misi kepala kampung terpilih, arah kebijakan pembangunan, rencana kegiatan tahunan, serta indikator keberhasilan pembangunan desa untuk kurun waktu enam tahun mendatang. Proses penyusunan dokumen ini dilaksanakan secara bertahap dengan mengedepankan pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Pada tahap awal, pengumpulan data dasar dan pemetaan potensi desa dilakukan melalui diskusi kelompok terarah serta observasi langsung di lapangan. Masyarakat turut berperan aktif dalam mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada di kampung mereka, yang kemudian menjadi landasan utama dalam merumuskan rencana pembangunan. Keterlibatan ini tidak hanya menghasilkan data yang relevan dengan kondisi aktual, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya data sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan yang tepat sasaran.

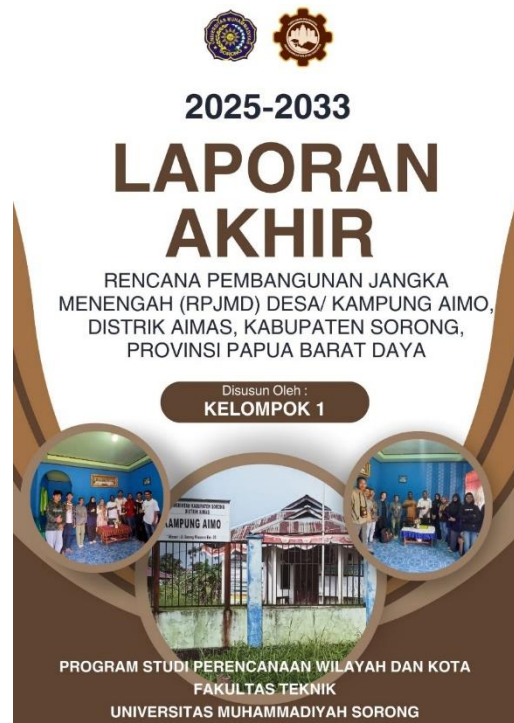


Gambar 1. Diskusi dengan Pemerintah Kampung Aimo

Selama pelaksanaan *workshop* dan pelatihan, aparat kampung serta anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur dan isi dokumen RPJMDes. Kegiatan ini menghasilkan peningkatan kemampuan peserta dalam memahami alur penyusunan dokumen, mulai dari analisis kondisi desa hingga perumusan program prioritas yang strategis. Para peserta juga berhasil menyusun bagan logis pembangunan yang selaras dengan visi dan misi kepala kampung terpilih. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat dari kehadiran dan keterlibatan aktif warga dalam forum musyawarah kampung (*muskam*). Berbagai kelompok masyarakat, seperti tokoh adat, pemuda, dan perempuan, turut menyampaikan aspirasi serta usulan program yang dianggap mendesak untuk segera direalisasikan. Keberagaman masukan ini menjadi kekuatan tersendiri dalam merumuskan program pembangunan yang inklusif dan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat Kampung Aimo.

Meskipun banyak capaian yang berhasil diraih, kegiatan ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh aparat kampung untuk mengikuti seluruh tahapan kegiatan secara menyeluruh, mengingat mereka juga memiliki tanggung jawab rutin sehari-hari. Selain itu, pemahaman awal yang masih terbatas mengenai pentingnya perencanaan jangka menengah menyebabkan antusiasme peserta cenderung rendah pada tahap awal kegiatan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pendekatan yang fleksibel diterapkan dengan menyesuaikan jadwal kegiatan sesuai dengan dinamika kerja kampung. Fasilitator juga berupaya membangun hubungan yang akrab melalui pendekatan informal dengan aparat kampung dan masyarakat. Langkah ini membawa hasil positif, di mana keterlibatan peserta secara bertahap meningkat, dan aparat kampung mulai menunjukkan inisiatif mandiri dalam menyusun dokumen tanpa harus sepenuhnya bergantung pada tim pendamping.

Kegiatan pendampingan ini turut membuka ruang dialog yang sebelumnya kurang terbentuk antara pemerintah kampung dan masyarakat. Diskusi mengenai prioritas pembangunan menghasilkan pemahaman bersama tentang keterbatasan anggaran dan pentingnya menentukan skala prioritas. Masyarakat mulai menyadari bahwa tidak semua aspirasi dapat diwujudkan dalam waktu singkat, tetapi dapat diintegrasikan ke dalam rencana jangka menengah. Dari aspek teknis, penyusunan RPJMDes telah mengacu pada pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Draft yang dihasilkan memuat profil kampung, hasil analisis SWOT, arah kebijakan pembangunan, serta rencana kerja tahunan yang disusun dalam format matriks. Dokumen ini telah siap untuk disempurnakan melalui forum musyawarah kampung sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi melalui peraturan kampung. Kegiatan pendampingan memberikan dampak positif yang nyata bagi Kampung Aimo. Selain menghasilkan dokumen RPJMDes sebagai panduan pembangunan, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya budaya perencanaan di tingkat kampung yang berbasis data dan mengedepankan partisipasi masyarakat. Dengan adanya RPJMDes yang tersusun secara baik, diharapkan Kampung Aimo dapat melaksanakan pembangunan desa secara lebih terarah, efisien, dan akuntabel dalam enam tahun ke depan. Kegiatan ini juga menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah kampung dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.



Gambar 2. Laporan Akhir RPJMDes Kampung Aimo

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kampung Aimo dilakukan dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong, Rencana Strategis (Renstra) Distrik Aimas, serta hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kampung Aimo. Struktur dokumen RPJMDes ini disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap aspek perencanaan pembangunan kampung tercakup secara komprehensif dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Berikut adalah penjelasan mengenai sistematika dokumen tersebut dalam bentuk narasi yang terstruktur untuk mencerminkan pendekatan akademis.

Dokumen RPJMDes Kampung Aimo diawali dengan Bab I: Pendahuluan, yang memuat latar belakang penyusunan dokumen, maksud dan tujuan yang meliputi maksud penyusunan serta tujuan yang ingin dicapai, dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan, dan tahapan-tahapan penyusunan RPJMDes. Tahapan tersebut mencakup musyawarah kampung tentang perencanaan pembangunan, pembentukan tim penyusun, penyesuaian arah kebijakan kampung dengan kebijakan daerah, pengkajian keadaan kampung, pemetaan dan pengembangan aset serta potensi kampung, penyusunan rancangan RPJMDes, musyawarah perencanaan pembangunan untuk membahas rancangan, musyawarah kampung untuk menyetujui dokumen, musyawarah BPK untuk menyetujui rancangan peraturan kampung, hingga sosialisasi dokumen RPJMDes kepada masyarakat. Selanjutnya, Bab II: Profil Kampung menguraikan kondisi umum Kampung Aimo, yang meliputi sejarah kampung, kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi, dan infrastruktur. Bagian ini juga membahas kondisi pemerintahan kampung, termasuk pembagian wilayah administratif dan struktur organisasi pemerintahan kampung, sebagai gambaran dasar yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan. Bab III: Visi dan Misi memaparkan visi yang menjadi cita-cita pembangunan kampung serta misi yang menjadi langkah strategis untuk mewujudkan visi tersebut dalam kurun waktu enam tahun. Pada Bab IV: Rumusan Prioritas Pembangunan Kampung, dokumen ini mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi kampung, potensi yang dapat dikembangkan, analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) sebagai alat analisis strategis, dan strategi pembangunan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis SWOT. Kemudian, Bab V: Arah Kebijakan Pembangunan Kampung menjelaskan arah kebijakan pembangunan yang akan diambil serta arah kebijakan keuangan kampung untuk mendukung implementasi program pembangunan. Bagian Bab VI: Program dan Kegiatan Pembangunan Kampung merinci program dan kegiatan yang direncanakan dalam lima bidang utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat kampung, serta penanggulangan bencana, keadaan mendesak, dan darurat lainnya. Terakhir, Bab VII: Penutup berisi kesimpulan dari keseluruhan proses perencanaan serta saran-saran untuk implementasi dan pengembangan lebih lanjut. Dokumen ini dilengkapi dengan lampiran, salah satunya adalah rencana program yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan. Pendekatan sistematika ini memastikan bahwa dokumen RPJMDes Kampung Aimo tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan proses perencanaan yang inklusif, berbasis data, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta regulasi yang berlaku. Untuk Sistematika RPJMDes Kampung Aimo mengikuti alur sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.2.1. Maksud Penyusunan Dokumentasi RPJMDes
 - 1.2.2. Tujuan Penyusunan Dokumentasi RPJMDes
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Tahapan Penyusunan RPJM Desa / Kampung
 - 1.4.1 Musyawarah Desa / Kampung tentang Perencanaan Desa /Kampung
 - 1.4.2 Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa / Kampung
 - 1.4.3. Penyesuaian Arah Kebijakan Desa / Kampung dengan Kebijakan
 - 1.4.4. Pengkajian keadaan Desa / Kampung
 - 1.4.5. Pemetaan dan pengembangan aset dan potensi aset Desa / Kampung
 - 1.4.6. Penyusunan rancangan RPJM Desa / Kampung
 - 1.4.7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa / Kampung membahas rancangan RPJM Desa / Kampung
 - 1.4.8 Musyawarah Desa / Kampung untuk membahas dan menyetujui RPJM Desa / Kampung
 - 1.4.9. Musyawarah BPD untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan Desa / Kampung tentang RPJM Desa / Kampung
 - 1.4.10. Sosialisasi RPJM Desa / Kampung

BAB II. PROFIL DESA / KAMPUNG

- 2.1 Kondisi Desa / Kampung
 - 2.1.1. Sejarah Desa / Kampung
 - 2.1.2. Kondisi Geografis Desa / Kampung
 - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa / Kampung

- 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa / Kampung
- 2.1.5. Kondisi Infrastuktur Desa / Kampung
- 2.2. Kondisi Pemerintah Desa / Kampung
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa / Kampung
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa / Kampung
- BAB III. VISI DAN MISI
 - 3.1. Visi
 - 3.2. Misi
- BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA /KAMPUNG
 - 4.1. Masalah
 - 4.2. Potensi
 - 4.3. Analisis SWOT
 - 4.4. Strategi Berdasarkan SWOT
- BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA / KAMPUNG
 - 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa / Kampung
 - 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa / Kampung
- BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA /KAMPUNG
 - 6.1. Bidang Penyelegaran Pemerintah Desa / Kampung
 - 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangun Desa / Kampung
 - 6.3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kampung
 - 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadan Mendesak dan Darurat Lainnya
- BAB VII PENUTUP
 - 7.1. Kesimpulan
 - 7.2. Saran

Lampiran

Lampiran 1. Rencana Program.

4.2 Pembahasan

Proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kampung Aimo berlangsung dengan cukup lancar, sebagaimana tercermin dari tingginya antusiasme peserta dalam mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemui beberapa kendala yang menjadi titik lemah dalam proses tersebut. Salah satu hambatan yang muncul adalah kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan terhadap urgensi penyusunan dokumen RPJMDes, yang terlihat dari kesulitan peserta saat melakukan pengumpulan data di tengah masyarakat, sehingga menunjukkan rendahnya partisipasi dan kesadaran akan pentingnya proses perencanaan jangka menengah desa ini. Hal ini sejalan dengan temuan Fry (2022) yang menyatakan bahwa implementasi pembangunan partisipatif dalam penyusunan RPJMDes sering kali terkendala oleh minimnya pemahaman masyarakat dan aparat desa terhadap peran strategis dokumen tersebut. Selain itu, perbedaan latar belakang pendidikan di antara para peserta menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pelatihan, yang mengakibatkan ketimpangan dalam pemahaman materi, di mana sebagian peserta mampu menyerap materi dengan baik, sementara sebagian lainnya masih menghadapi kesulitan untuk memahami isi pelatihan secara menyeluruh. Tantangan ini juga diperkuat oleh penelitian Sahri *et al.* (2022) yang menyoroti perlunya pendekatan pelatihan yang inklusif untuk mengatasi disparitas kemampuan peserta dalam proses penyusunan RPJMDes. Tak hanya itu, terdapat pula kecenderungan dominasi dari pihak tertentu yang berupaya memasukkan program dan kegiatan mereka secara sepihak ke dalam dokumen RPJMDes, sehingga mengurangi sifat aspiratif dari dokumen tersebut karena tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Fenomena ini sesuai dengan catatan Nining *et al.* (2023) yang menggarisbawahi bahwa dominasi pihak tertentu dalam proses pembangunan desa dapat melemahkan partisipasi masyarakat dan mengesampingkan aspirasi kolektif.

5 | KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan pendampingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Kampung Aimo telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kapasitas perencanaan pembangunan di tingkat desa. Melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, pemerintah kampung bersama masyarakat berhasil menyusun draf awal dokumen RPJMDes yang mencerminkan visi dan misi kepala kampung, kebutuhan riil masyarakat, serta arah pembangunan yang sistematis untuk enam tahun ke depan. Selain menghasilkan dokumen perencanaan, kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparat kampung serta lembaga desa dalam proses perencanaan yang sesuai dengan

regulasi. Proses ini sekaligus membuka ruang dialog antara pemerintah kampung dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya data, musyawarah, dan skala prioritas dalam pembangunan desa. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendampingan yang terstruktur, disesuaikan dengan konteks lokal, dan dilakukan secara kolaboratif dapat membantu desa dalam membangun kemandirian perencanaan. Untuk menjaga keberlanjutan, diperlukan langkah lanjutan berupa monitoring pelaksanaan RPJMDes serta pelatihan tambahan terkait implementasi dan evaluasi program desa. Dengan demikian, Kampung Aimo diharapkan mampu melaksanakan pembangunan desa secara efektif, transparan, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kampung Aimo, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, beserta seluruh aparat kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), tokoh masyarakat, dan warga yang telah memberikan dukungan dan partisipasi aktif selama proses pendampingan berlangsung. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak universitas dan lembaga terkait yang telah memberikan dukungan moril maupun material, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan.

REFERENSI

- Baihaqi, B., Sari, R. P., & Asmawanti, S. D. (2019). Proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa (Studi di desa-desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 61–76. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.1.61-76>
- Femilia, Y., & Huda, U. N. (2020). Kewenangan desa dalam penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Desa. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(1), 121–140. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.5752>
- Fry, A. S. F. (2022). Implementasi pembangunan partisipatif dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4), 11136–11149. <http://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/1001>
- Hasanati, S., Rijanta, R., Pitoyo, A. J., & Muliawati, A. (2025). Analisis tinjauan dokumen RPJM Desa Sidoharjo, Gunungkidul, DI Yogyakarta 2016-2021. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 20(1), 402. <https://doi.org/10.20961/region.v20i1.92026>
- Hendra, H., & Fahlevi, A. H. (2024). Implementation of good corporate governance (GCG) principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District. *IAPA Proceedings Conference*, 187. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1052>
- Hendri, H. (2022). Implementation of the Medium Term Development Plan (RPJM) in village in Pelalawan Regency based on Law Number 6 of 2014 concerning village. *Jurnal Gagasan Hukum*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.31849/jgh.v4i01.10441>
- Londa, V. Y., Ruru, J., & Onnoa, R. (2021). Perencanaan pembangunan di Desa Musi Satu Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud Rutli. *Jurnal Administrasi*, 7(102), 43–52. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/34890/32716>
- Nining, N., Setiawati, B., & Mone, A. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 4(3), 646–659. <https://doi.org/10.26618/kimap.v4i3.11871>
- Permana, A. F. (2018). Pendapatan asli desa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pembangunan desa. *Manajemen dan Ekonomi*, 1(2), 15–29.
- Sahri, Salmah, E., Harsono, I., Masrun, M., & Firmansyah, F. (2022). Pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan pertanggungjawaban dana desa di Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Abdimas Independen*, 3(1), 95–111. <https://doi.org/10.29303/independen.v3i1.140>

- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Sumarauw, R. D. F., Manosoh, H., & Warongan, J. D. L. (2019). Analisis pelaksanaan dan pelaporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Bolangitang Kecamatan Bolaang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal EMBA*, 7(5), 3199–3208.
- Syamsudin. (2022). Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen RPJM Desa berdasarkan wilayah dusun di Desa Kertosono Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo. *Jurnal Enersia Publika*, 6(5), 172–173.

How to cite this article: Ibal, L., Madaul, R. A., Hilmansyah, H. ., Marshush, U. H., Abubakar, E., Murni, M., Salam, R. A., Wulandari, M., Widodo, S., & Klau, S. V. . (2025). Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kampung Aimo, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 327–334. <https://doi.org/10.59431/ajad.v5i2.584>.